

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA PANTAI KABUPATEN SUBANG

Oleh:

Tri Ratna Saridewi

Staf Pengajar Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Bogor

ABSTRAK

Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki panjang garis pantai sekitar 68 km di daerah Pantai Utara dan luas area pertambakan sebesar 10.000 ha, merupakan potensi untuk pengembangan perikanan, baik tambak maupun perikanan tangkap. Jika dilihat dari potensi tersebut, ternyata kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Subang masih rendah, yaitu sebesar 1,85% pada tahun 2001. Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untuk meningkatkan hasil melalui pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat.

Perkembangan perekonomian desa pantai Kabupaten memberikan kontribusi dalam pembangunan lebih rendah dibandingkan desa lain. Upaya peningkatan produktivitas dan produksi di desa pantai lebih sulit karakteristik masyarakat pantai yang berbeda dengan masyarakat lain. Keterlibatan masyarakat desa pantai dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Subang sangat diperlukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang pada akhirnya adanya partisipasi masyarakat desa pantai dalam pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas dan alternatif kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang melalui intuisi *key person* (informan) yang *full information*. Hasil penelitian ini merupakan kontribusi ilmiah dalam pertimbangan pengambilan keputusan tentang suatu kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan *stakeholders* berdasarkan panduan daftar pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui aspirasi dan persepsi mereka, dan mendapatkan alternatif kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang. Pemilihan sampel untuk wawancara umum dilakukan secara *purposive random sampling* (secara sengaja), yaitu sample ditarik secara sengaja dari berbagai kelompok masyarakat yang menjadi *key person*.

Informan (*key person*) yang diminta mengisi kuesioner terdiri atas: (1) 1 orang dari lembaga penelitian, 1 orang dari perguruan tinggi, 1 orang dari sekolah perikanan yang dianggap dapat mewakili *stakeholders* dari kelompok akademisi; (2) 2 orang dari Bappeda, 1 orang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Subang, dan (3) 1 orang dari DPRD dan 5 orang dari pemuka masyarakat desa pantai yang dianggap dapat mewakili organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disusun model pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang, yang menjadi tujuan umum analisis kebijakan. Model tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan kuesioner kepada para *key person*. Selanjutnya kuesioner dianalisis dengan AHP dan ditentukan hasil yang terbaik berdasarkan kecenderungan dan tingkat konsistensi yang paling tinggi.

Hasil yang diperoleh dari AHP adalah untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang, para responden menetapkan bahwa kriteria yang memberikan bobot tertinggi adalah Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (MPM) dengan nilai 0,789. Kriteria kedua adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (MPAD) dan kriteria ketiga

adalah Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat (0,103). Sedangkan prioritas pertama kegiatan yang harus dilakukan untuk pengembangan desa pantai Kabupaten Subang adalah kegiatan Pengembangan Budidaya Tambak/*Sylvofisheries* dengan bobot 0,311.

Berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan melalui simulasi sampai perubahan sebesar 10% tidak menunjukkan adanya perubahan prioritas kegiatan, yang berarti bahwa hasil AHP ini cukup layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.

Kata kunci: Sumberdaya Perikanan, Desa Pantai Kabupaten Subang, *Analysis Hierarchy Process* (AHP), *Key Person* (informan), *Purposive Random Sampling*.

PENDAHULUAN

Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik bidang pertanian, perikanan, kehutanan maupun industri. Panjang garis pantai sekitar 68 km di daerah Pantai Utara dan luas area pertambakan sebesar 10.000 ha merupakan potensi yang dimiliki desa pantai di Kabupaten Subang untuk pengembangan perikanan, baik tambak maupun perikanan tangkap. Jika dilihat dari potensi tersebut, ternyata kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Subang masih rendah, yaitu sebesar 1,85% pada tahun 2001. Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untuk meningkatkan hasil melalui pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang diharapkan dapat menyusun kebijakan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan yang disusun oleh Pemda Kabupaten Subang harus memperhatikan karakteristik dan dinamika masyarakat pesisir, faktor ekonomi, sosial budaya, lingkungan serta faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya perikanan.

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Perkembangan perekonomian desa pantai Kabupaten Subang telah berjalan seiring dengan proses pembangunan, namun dibandingkan dengan desa di luar desa pantai kontribusi dalam pembangunan lebih rendah. Upaya peningkatan produktivitas dan produksi sektor perikanan laut lebih sulit dibandingkan dengan perikanan darat dan sektor pertanian lain karena karakteristik sumberdaya perikanan laut yang bersifat *open access* dan sifat ikan yang bergerak tanpa batas. Selain itu, menurut Kusumastanto (2002) karakteristik masyarakat pantai berbeda dengan masyarakat lain, karena adanya perbedaan karakteristik ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, maupun latar belakang adat dan budaya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan, diantaranya adalah dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Keterlibatan masyarakat desa pantai dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Subang sangat diperlukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang pada akhirnya adanya partisipasi masyarakat desa pantai dalam pembangunan.

Dinamika pembangunan dan proses sosial kondisi dinamis menjadikan penyusunan kebijakan sulit dilakukan, di samping keterbatasan dana dan keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia dalam proses pembangunan. Untuk itu diperlukan adanya prioritas pembangunan, sesuai dengan

kebutuhan yang paling mendesak yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini diperlukan agar roda pembangunan tetap berjalan dengan baik sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas dan alternatif kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang melalui intuisi *key person* (informan) yang *full information*. Hasil penelitian ini merupakan kontribusi ilmiah dalam pertimbangan pengambilan keputusan tentang suatu kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa pantai Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Blanakan, Pamanukan, Pusakanagara dan Legonkulon. Penelitian dilaksanakan dari Bulan Mei sampai dengan Oktober 2002.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Penelitian terdiri dari dua tahap, yang pertama adalah mempelajari kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat pantai dan dari hasil tersebut disusun suatu model kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat pantai Kabupaten Subang. Model yang telah disusun ini dijadikan pedoman untuk pengumpulan data primer. Tahap kedua adalah pengumpulan data primer yang berupa pengisian kuesioner berdasarkan model yang ada.

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan *stakeholders* berdasarkan panduan daftar pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui aspirasi dan persepsi

mereka, dan mendapatkan alternatif kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang. Pemilihan sampel untuk wawancara umum dilakukan secara *purposive random sampling* (secara sengaja), yaitu sample ditarik secara sengaja dari berbagai kelompok masyarakat yang menjadi *key person*. Teknik ini lebih mengandalkan *common sense* atas kaidah yang berlaku. Pemilihan responden dengan sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa responden mampu berkomunikasi dengan baik dalam pengisian kuesioner (Fauzi, 1999).

Informan (*key person*) yang diminta mengisi kuesioner *Analytical Hierarchy Process* terdiri atas: (1) 1 orang dari lembaga penelitian, 1 orang dari perguruan tinggi, 1 orang dari sekolah perikanan yang dianggap dapat mewakili *stakeholders* dari kelompok akademisi; (2) 2 orang dari Bappeda, 1 orang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Subang, dan (3) 1 orang dari DPRD dan 5 orang dari pemuka masyarakat desa pantai yang dianggap dapat mewakili organisasi kemasyarakatan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan *Analisis Hierarchy Process* (AHP), karena AHP merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk kondisi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi dan beragamnya kriteria suatu pengambilan keputusan (Saaty, 1993).

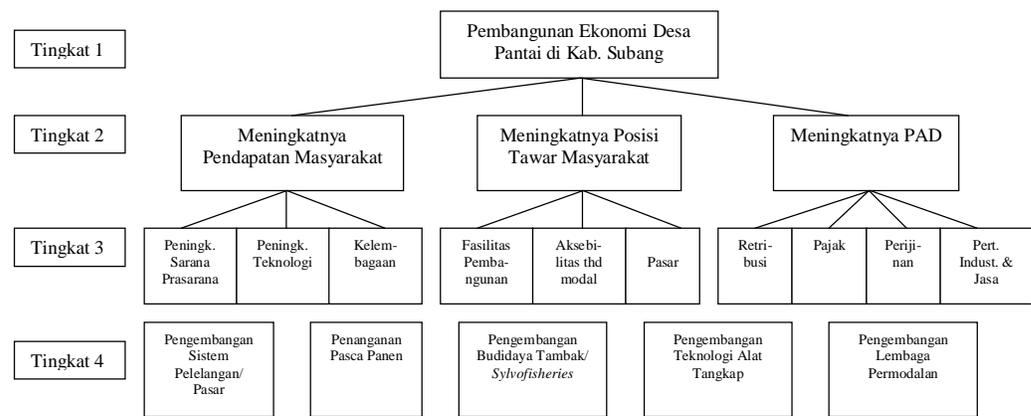
Proses analisis dengan AHP dilakukan dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*) untuk mendapatkan tingkat kepentingan (*importance*) suatu kriteria relatif terhadap kriteria lain dan dapat dinyatakan dengan jelas. Proses perbandingan berpasangan ini dilakukan untuk setiap level/tingkat; tingkat 1 (tujuan umum), tingkat 2 (kriteria), tingkat 3 (sub kriteria), tingkat 4 (alternatif kegiatan). Proses analisis AHP ini dilakukan dengan perangkat lunak *Expert Choise* versi 9.0.

Sensitivitas Hasil Analisis AHP

Sebagaimana sebuah analisis multi-kriteria, AHP menurut Triantaphyllou and Alfonso (1997) harus dilengkapi dengan analisis sensitifitas. Analisis sensitifitas ini digunakan untuk dapat melihat *range* (batasan) perubahan pendapat *key person* dalam pengambilan keputusan dengan AHP. Dengan analisis sensitifitas dapat dilihat komponen/elemen mana dari struktur hirarkhi yang paling sensitif terhadap perubahan bobotnya sehingga menghasilkan perubahan pada alternatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disusun model pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang, yang menjadi tujuan umum analisis kebijakan. Model tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan kuesioner kepada para *key person*. Selanjutnya kuesioner dianalisis dengan AHP dan ditentukan hasil yang terbaik berdasarkan kecenderungan dan tingkat konsistensi yang paling tinggi. Model pengembangan yang disusun dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Bagan Analisis Kebijakan

Pada gambar 1 di atas, terlihat bahwa pada tingkat 1 adalah tujuan umum yang hendak dicapai, yaitu Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir Kabupaten Subang. Tingkat 2 merupakan kriteria yang terdiri Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tingkat 3 merupakan sub kriteria dan tingkat 4 adalah alternatif kegiatan. Sedangkan alternatif kegiatan terdiri dari Pengembangan Sistem Pelelangan/Pasar, Penanganan Pasca Panen, Pengembangan Budidaya Tambak/Sylvofisheries, Pengembangan teknologi Alat Tangkap dan Pengembangan Lembaga Permodalan Lokal.

Berdasarkan Tabel di bawah, terlihat bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi wilayah pesisir, maka para responden menetapkan kriteria yang memberikan bobot tertinggi adalah Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (MPM) dengan nilai 0,789. Kriteria kedua adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (MPAD) dan kriteria ketiga adalah Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat (0,103).

Kriteria Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (MPM) terdiri dari sub kriteria Peningkatan Sarana Prasarana yang memberikan bobot 0,338, Peningkatan Teknologi yang memberikan bobot 0,338 dan Penguatan Kelembagaan yang

memberikan bobot 0,113. Berdasarkan bobot sub kriteria ini para responden berpendapat bahwa untuk pembangunan ekonomi wilayah pesisir, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah peningkatan pendapatan

masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan peningkatan teknologi. Selanjutnya sub kriteria ini menentukan jenis (alternatif) kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Pengembangan Ekonomi Desa Pantai di Kabupaten Subang
Synthesis of Leaf Nodes with respect to Goal Overall Inconsistency Index = 0,0

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
PEDP=1	MPM = ,789		
		PPP = ,338	
			PBT/S= ,338
			PTAT= ,215
			PSP/P= ,150
			PLPL= ,125
			PPP = ,095
		PT = ,338	
			PBT/S= ,338
			PTAT= ,338
			PLPL= ,147
			PSP/P= ,055
			PPP = ,041
		Klemb.=,113	
			PSP/P= ,113
			PBT/S= ,102
			PTAT= ,102
			PLPL= ,047
			PPP= ,047
	MPAD= ,108		
		Retri = ,041	
			PSP/P = ,041
			PTAT = ,016
			PBT/S= ,012
			PLPL= ,008
			PPP= ,004
		Pajak= ,041	
			PLPL= ,041
			PSP/P= ,027
			PBT/S= ,016
			PTAT= ,014
			PPP = ,011

		PSIdJ = ,013	
			PLPL= ,013
			PBT/S= ,002
			PTAT= ,002
			PSP/P= ,002
			PPP = ,002
		Perijin= ,013	
			PSP/P = ,013
			PBT/S = ,010
			PTAT = ,010
			PLPL = ,007
			PPP = ,003
	MTPM=,103		
		FB = ,034	
			PBT/S = ,034
			PTAT = ,034
			PSP/P = ,034
			PLPL = ,034
			PPP = ,013
		AtM = ,034	
			PLPL = ,034
			PBT/S = ,007
			PTAT = ,007
			PSP/P = ,007
			PPP = ,007
		Pasar = ,034	
			PSP/P = ,034
			PLPL = ,013
			PBT/S=,008
			PTAT = ,008
			PPP = ,004

Dapat diketahui bahwa yang harus dilakukan pertama adalah peningkatan sarana prasarana pada kegiatan budidaya tambak atau silvofisheries (PBTS) dengan bobot 0,338 diikuti oleh peningkatan teknologi alat tangkap (PTAT) dengan bobot 0,215 sedangkan peningkatan teknologi yang pertama harus dilakukan adalah pada kegiatan budidaya tambak atau silvofisheries (PBTS)

dan peningkatan teknologi alat tangkap (PTAT) yang keduanya memiliki bobot 0,338. Kegiatan pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan adalah kegiatan pengembangan sistem pelelangan pasar (PSP/P) dengan bobot 0,113 yang diikuti oleh kegiatan budidaya tambak atau silvofisheries (PBTS) dengan bobot 0,102.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa para responden berpendapat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan sarana prasarana dan teknologi budidaya tambak atau silvofisheries dan teknologi alat penangkapan.

Kriteria Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (MPAD) disumbang oleh sub kriteria Retribusi dan Pajak yang memiliki bobot sama yaitu 0,041, subkriteria Pertumbuhan Sektor Industri dan Jasa (PSIdJ) dengan bobot 0,013 dan sub kriteria Perijinan memberikan bobot 0,013. Retribusi yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pengembangan Sistem Pelelangan/Pasar (PSP/P) dengan bobot 0,041. Sedangkan kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak adalah Pengembangan Lembaga Permodalan Lokal (PLPL) dengan bobot 0,041.

Berdasarkan hasil tersebut dapat digarisbawahi bahwa para responden berpendapat untuk meningkatkan PAD maka kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah menertibkan retribusi sistem pelelangan/pasar dan menarik pajak dari lembaga permodalan lokal.

Kriteria Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat (MPTM) terdiri dari sub kriteria Fasilitas Pembangunan (FP), Aksesibilitas terhadap Modal (AtM) dan Pasar yang ketiganya memiliki bobot sama yaitu 0,034. Fasilitas pembangunan diberikan kepada semua alternatif kegiatan, kecuali Penanganan Pasca Panen karena keempat kegiatan tersebut memberikan bobot yang sama, yaitu 0,034. Aksesibilitas terhadap Modal diberikan terlebih dahulu kepada kegiatan Pengembangan Lembaga Permodalan Lokal (PLPL) yang memberikan bobot 0,034 sedangkan perbankan Pasar dilakukan terlebih dahulu untuk kegiatan Pengembangan Sistem Pelelangan Pasar (PSP/P) yang memberikan bobot 0,034.

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa para responden berpendapat bahwa untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat alternatif kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah peningkatan fasilitas pembangunan dari kegiatan budidaya tambak/silvofisheries, pelelangan/pasar, teknologi alat tangkap dan lembaga permodalan lokal. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal diberikan terlebih dahulu kepada kegiatan pengembangan lembaga permodalan lokal dan perbankan dilakukan terlebih dahulu untuk kegiatan Pengembangan Sistem Pelanggan/Pasar.

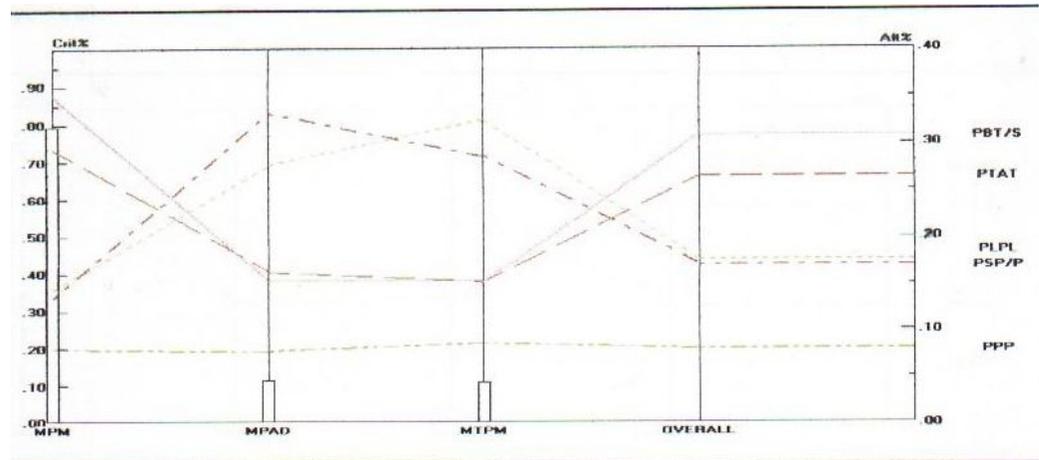
Sedangkan dalam menentukan alternatif kegiatan yang mungkin dapat dikembangkan perlu disusun berdasarkan prioritas kegiatannya dengan memperhatikan kriteri-kriteria di atas. Hasil analisis AHP yang ditampilkan pada Gambar 1, terlihat bahwa para informan menempatkan Pengembangan Budidaya Tambak/*Silvofisheries* (PBT/S) sebagai alternatif kegiatan pembangunan ekonomi wilayah pesisir prioritas pertama dengan bobot 0,311. Pada prioritas selanjutnya secara berturut-turut alternatif kegiatan pembangunan ekonomi wilayah pesisir di Kabupaten Subang adalah Pengembangan Teknologi Alat Tangkap (PTAT) dengan bobot 0,268; Pengembangan Sistem Pelelangan/Pasar (PSP/S) dengan bobot 0,171; Pengembangan Lembaga Permodalan Lokal (PLPL) dengan bobot 0,169; dan Penanganan Pasca Panen (PPP) dengan bobot 0,082. Susunan prioritas kegiatan di atas sesuai dengan susunan pada kriteria meningkatkan pendapatan masyarakat (MPM), karena bobot kriteria meningkatkan pendapatan masyarakat yang memberikan kontribusi nilai terbesar (MPM). Selain itu, hasil ini sesuai dengan kondisi wilayah pesisir yang masyarakatnya mayoritas memiliki pendapatan rendah dan sedikitnya sarana prasarana serta rendahnya tingkat teknologi yang digunakan dalam aktivitas perikanan.

Penentuan Sensitifitas Perubahan Prioritas Alternatif terhadap Perubahan Bobot Kriteria

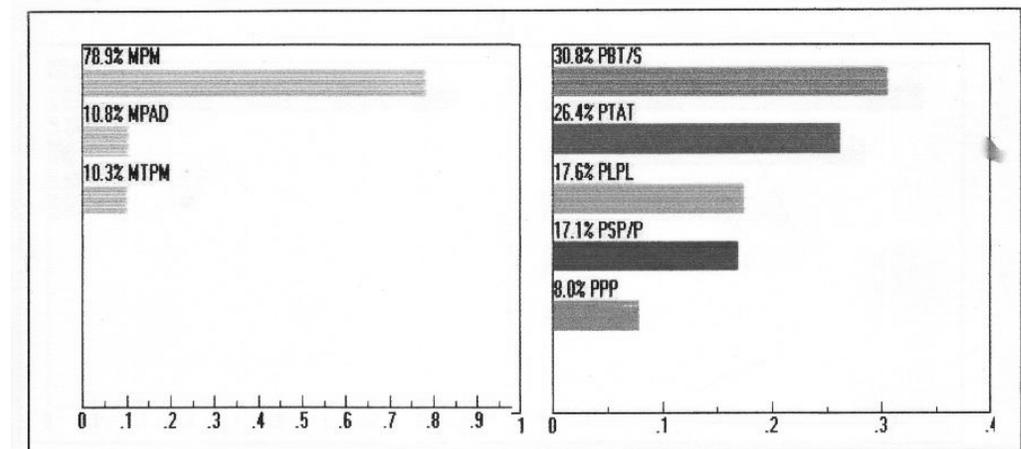
Sebagaimana sebuah analisis multi-kriteria, menurut Triantaphyllou and Alfonso (1997), AHP harus dilengkapi dengan analisis sensitifitas. Analisis sensitifitas ini digunakan untuk dapat melihat kelayakan pendapat responden untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan dengan AHP. Dengan analisis sensitifitas dapat dilihat komponen atau elemen mana dari struktur

hierarki yang paling sensitif terhadap perubahan bobotnya sehingga menghasilkan perubahan pada alternatif.

Di tingkat operasional, analisis sensitifitas digunakan untuk dapat melihat seberapa besar pengaruh kriteria (level 2) menentukan alternatif prioritas (level 4). Sensitifitas perubahan prioritas alternatif (level 4) dengan berubahnya bobot kriteria (level 2) dapat dijelaskan dengan melakukan simulasi terhadap hasil analisis sensitifitas pendapatan *key person* (informan).



A



(B)

Gambar 2. (A) Performances dan (B) Dynamic Sensitivity Analysis terhadap Pendapat Key Person (Informan)

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa kriteria yang paling sensitif terhadap perubahan bobot untuk merubah prioritas alternatif adalah dalam peningkatan pendapatan masyarakat (MPM) dengan bobot 78,9%, sedangkan sebaliknya kriteria yang paling rendah sensitifitasnya adalah meningkatkan posisi tawar masyarakat (MPTM) dengan bobot 10,3%. Artinya perubahan bobot pada kriteria MPM akan mempengaruhi bobot pada alternatif-alternatif kegiatan ekonomi. Simulasi dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan bobot masing-masing kriteria sebesar 10% menggunakan program *expert choise* versi 9,0.

Berdasarkan simulasi tersebut diketahui bahwa sampai perubahan sebesar 10% tidak menunjukkan adanya perubahan prioritas kegiatan. Hal ini berarti bahwa hasil AHP ini cukup layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang. Konsistensi ini cukup penting artinya karena menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Dunn (1998) kebijakan didefinisikan sebagai suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang, para responden menetapkan bahwa kriteria yang memberikan bobot tertinggi adalah Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (MPM) dengan nilai 0,789. Kriteria kedua adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (MPAD) dan kriteria ketiga adalah Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat (0,103).
2. Para responden menetapkan bahwa prioritas pertama yang harus dilakukan

untuk pengembangan desa pantai Kabupaten Subang adalah kegiatan Pengembangan Budidaya Tambak/*Sylvofisheries* dengan bobot 0,311. Prioritas kedua adalah Pengembangan Teknologi Alat Tangkap (PTAT) dengan bobot 0,268, prioritas ketiga Pengembangan Sistem Pelelangan/Pasar (PSP/S) dengan bobot 0,171, keempat adalah Pengembangan Lembaga Permodalan Lokal (PLPL) dengan bobot 0,169 dan terakhir Penanganan Pasca Panen (PPP) dengan bobot 0,082.

3. Berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan melalui simulasi sampai perubahan sebesar 10% tidak menunjukkan adanya perubahan prioritas kegiatan, yang berarti bahwa hasil AHP ini cukup layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.

Saran

Penggunaan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam analisis kebijakan yang menjadi penentu utama keabsahan, keakuratan, serta ketajaman hasil analisis sangat ditentukan oleh *key person* yang diwawancarai. Melihat potensi sumberdaya manusia di daerah secara umum, maka *key person* terpilih benar-benar diketahui kemampuan analisis dan pemahamannya tentang permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda dan BPS Kabupaten Subang. 2001. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Subang*. Subang.
- Dunn, W. N. 1988. *Analisa Kebijaksanaan Publik*, diterjemahkan oleh : Muhadjir Darwis. P.T. Hanindita Graha Widya. Yogyakarta.
- Fauzi, A. 1999. *Teknik Pengambilan Contoh untuk Penelitian Sosial Ekonomi*. IPB.

- Kusumastanto, T. 2002. *Reposisi "Ocean Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah. IPB.
- Saaty, T.L 1991. *Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. (Terjemahan).
- Triantaphylou, E. dan A. Sanchez. 1997. *A Sensitivity Analysis Approach for Some Deterministic Multi-criteria Decision Making Methods*. Decision Scinces Vol 28: 151-194.